

**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN SUSUKAN
TAHUN 2024
(PENYELARASAN)**



**PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2024**

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	1
DAFTAR ISI	2
DAFTAR TABEL	3
BAB I PENDAHULUAN	4
1.1. Latar Belakang	4
1.2. Landasan Hukum	5
1.3. Maksud dan Tujuan	8
1.4. Sistematisasi Penulisan	9
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	11
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	11
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	24
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	29
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	31
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	45
2.6. Penelaahan Usulan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	47
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	48
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	48
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....	49
3.3. Program dan Kegiatan	52
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	57
BAB V PENUTUP	58

DAFTAR TABEL

- Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara dan Pencapaian Renstra Kecamatan Susukan Kabupaten BANJARNEGARA Tahun 2023.....hal 15
- Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara [hal 27](#)
- Tabel 2.3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Kecamatan Susukan..... hal 32
- Tabel 2.4 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024.....[hal 45](#)

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan daerah untuk menyusun 5 (lima) dokumen perencanaan pembangunan, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah. Dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 *juncto* Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, terminologi Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah) didefinisikan sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan yang diatur melalui Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yang diawali dengan pembentukan tim penyusun, penelaahan rancangan awal RKPD, pelaksanaan forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah, hingga pada penyempurnaan berdasarkan pada Peraturan Bupati tentang RKPD. Selain berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD, penyusunan Renja Perangkat Daerah juga mengacu pada Renja Kementerian/Lembaga terkait, serta Renja Perangkat Daerah Provinsi terkait. Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan tahunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), yakni sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

1.2. Landasan Hukum

Renja Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 disusun dengan berdasarkan pada:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73.
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pelaporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

- Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447).
 18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
 19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 121);
 20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Banjarnegara 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Banjarnegara 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 2 Seri E);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjarnegara 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembara Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 145);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 213) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 24 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor Tahun 2019 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 286);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 233);

1.3. Maksud dan Tujuan

Renja Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 disusun dengan maksud untuk:

- a. Menjabarkan RKPD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 ke dalam rencana program kegiatan prioritas Tahun 2024 yang diselaraskan dengan sasaran dan program Renja K/L Tahun 2024 dan Renja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024;
- b. Mewujudkan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan sumber daya daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah melalui penerapan anggaran berbasis kinerja.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- a. Menjadi pedoman dalam menyusun RKA-DPA dalam Rancangan APBD Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2024, yang dalam penyusunannya didahului dengan menyusun Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2024;
- b. Sebagai instrumen evaluasi dan pengendalian program dan kegiatan Tahun 2024;
- c. Menjadi media akuntabilitas dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

1.4. Sistematika Penulisan

Renja Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 disusun berdasarkan sistematika yang diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yaitu sebagai berikut:

BAB 1 : PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan penyusunan Renja Perangkat Daerah, serta sistematika dokumen Renja Perangkat Daerah.

BAB 2 : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Memuat evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan capaian Renstra Perangkat Daerah, analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, dan review terhadap rancangan awal RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat dan atau pokok-pokok DPRD.

BAB 3 : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah, serta program dan kegiatan tahun 2024.

BAB 4 : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Memuat rencana program dan kegiatan prioritas Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan dalam rangka pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah dan sasaran RKPD.

BAB 5 : PENUTUP

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023 disusun untuk menjawab permasalahan dan isu-isu strategis Kabupaten Banjarnegara yang berkaitan dengan urusan yang menjadi tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Urusan yang menjadi kewenangan Perangkat Daerah meliputi urusan yang menjadi kewenangan Perangkat Daerah meliputi urusan Pemerintahan fungsi penunjang kewilayahan.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 yang tercantum dalam RKPD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023 terdiri dari 6 program, 12 kegiatan, dan 27 sub kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 2.043.686.840-, dengan fokus utama sesuai Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, dengan fokus utama sesuai Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja, Kecamatan memiliki tugas membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan dan tugas yang dilimpahkan Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Program/kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan pembangunan daerah yang meliputi :

1. Belum optimalnya etos kerja, budaya kerja dan disiplin kerja pegawai;
2. Masih kurangnya dukungan data informasi dari masyarakat , peraturan yang valid, akurat dan terintegrasi sebagai pedoman dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat;
3. Masih rendahnya keselarasan dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang ada;
4. Apatisme masyarakat dalam mengikuti musrenbang;
5. Masih kurangnya pemahaman masyarakat maupun aparatur desa tentang hakekat pembangunan nasional;

6. Masih terbatasnya kapasitas aparatur desa dalam melaksanakan tertib administrasi pemerintahan desa;
7. Masih kurangnya keseriusan masyarakat dan petugas pemungut dalam pelunasan PBB lebih awal;

Dari 6 program, 12 kegiatan, dan 27 sub kegiatan yang ada dalam Renja Perangkat Daerah tersebut, program/kegiatan/sub kegiatan yang disetujui untuk dianggarkan dalam APBD Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2023 terdiri dari 6 program, 12 kegiatan, dan 27 sub kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 2.043.686.840,-

Pada Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023, terjadi beberapa perubahan yang meliputi penambahan atau pengurangan pagu. Perubahan tersebut mengubah rincian dalam Renja Perangkat Daerah menjadi 6 program, 12 kegiatan dan 27 sub kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp 1.592.359.733,- Pada Perubahan Renja Perangkat Daerah tahun 2023.

Dinamika yang terjadi selama tahun 2023 turut mempengaruhi keberhasilan pencapaian Renja Perangkat Daerah. Dalam pelaksanaan APBD Tahun 2023, tercatat adanya hasil yang baik yang dikarenakan adanya pencapaian maupun pelampauan target maupun yang tidak memenuhi target.

Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan meliputi Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah, Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, sedangkan realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Sub Kegiatan Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang

dilimpahkan. Faktor-faktor yang mempengaruhi ketercapaian tersebut antara lain adalah:

1. Merencanakan target kinerja;
2. Menyelaraskan hal-hal yang akan dikerjakan dengan target kinerja;
3. Menyelaraskan apa yang dianggarkan dengan apa yang akan dikerjakan;
4. Mengerjakan kegiatan sesuai dengan rencana kerja;
5. Melaporkan capaian kinerja selaras dengan apa yang telah dilaksanakan dan direncanakan sebelumnya.

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, maka masih banyak yang harus diperhatikan dan ditingkatkan kinerjanya agar sesuai dengan indikator kinerja.

Pada tahun perencanaan selanjutnya, perlu diambil kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut, diantaranya:

1. Koordinasi yang baik antara masing – masing Kasi dan Kasubag
2. Prioritas Perencanaan yang tepat sasaran, agar kegiatan bisa berjalan sesuai perencanaan
3. Adanya anggaran yang mendukung kegiatan

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2023 disajikan pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.1

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah
s.d Tahun 2023 Kabupaten Banjarnegara**

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=7/6	(9)	(10)=5+7+9	(11)=10/4
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMEINTAH DAERAH KABUPATEN									
		Nilai SAKIP		B	B	B		B	B	
		Nilai SKM		100%	86	86,13	100%	86	86,13	100%
	Urusan Perencanaan									
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase keselarasan dokumen perencanaan		100%	7 dok	7 dok	100%	7dok	7 dok	100%
	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen pelaporan yang disusun		100%	7 Dok	7 dok	100%	7 dok	7 dok	100%

	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen pelaporan yang disusun		100%	8 Dok	8 Dok	100 %	7 dok	7 dok	100%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase ketepatan penyusunan dokumen pelaporan keuangan								
	Penyedia gaji dan tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terbayarkan		100%	10 org	10 org	100%	10 orang	10 orang	100%
	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah pengelola keuangan yang terbayarkan		100%	5 Org	5 org	100%	5 Orang	5 orang	100%
	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran	Jumlah laporan keuangan yang disusun		100%	4 dok	4 dok	100 %	4 Dok	4 dok	100%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi umum perangkat daerah		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan dan Perlengkapan Kantor yang terpenuhi		100%	2 Paket	2 paket	100 %	2 Paket	2 paket	100%
	Penyedia bahan logistik kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang terpenuhi		100%	11 Paket	11 Paket	100 %	11 Paket	11 paket	100%
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

		Pemerintahan Daerah yang terpenuhi								
	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang terpenuhi		100%	35 unit	32 unit	92%	32 unit	32 unit	100%
	Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah								
	Penyedia jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah penyedia jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik yang terpenuhi		100%	3 paket	3 paket	100%	2 Paket	2 paket	100%
	Penyedia jasa pelayanan umum kantor	Jumlah tenaga administrasi perkantoran yang terbayarkan		100%	3 org	3 org	100%	3 orang	3 orang	100%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur								
	Penyedia jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara		100%	7 unit	7 unit	100%	7 Unit	7 unit	100%
	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor, rumah dinas dan uala yang terpelihara		100%	9 unit	9 unit	100%	9 unit	9 Unit	100%
	PROGRAM PENYELENGGARAAN									

	PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK									
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Prosentase pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat								
	Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Pelayanan Perizinan Non Usaha yang terlayani		100%	2500 pemohon	2331 pemohon	93%	2331 pemohon	2331 pemohon	
	Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan	Jumlah laporan Pelaksanaan Non Perizinan		100%	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	12 laporan	100%
	Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	Jumlah pengelola SPPT PBB tersalurkan		100%	3000 pemohon	100%	100%	38.218 SPPT	38.218 SPPT	100%

	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan								
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Presentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa								
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Desa	Jumlah Laporan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di desa		100%	1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	1 laporan	100%
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Prosentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum								
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Presentase Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum								
	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	umlah laporan Harmonisasi Hubungan dengan		100%	1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	1 laporan	100%

		Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat								
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM									
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Prosentase penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan Kepala Daerah yang dilaksanakan								
	Pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di Kecamatan	Jumlah pelaksanaan tugas forkompimca		100%	1 tahun	1 tahun	100%	1 tahun	1 tahun	1 tahun
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA									
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan	Prosentase fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi								

	Pengawasan Pemerintahan Desa	pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa								
	Fasilitasi penyusunan peraturan desa dan kepala desa	Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam rangka penyusunan peraturan desa dan kepala desa		100%	15 Desa	15 desa	100%	15 Desa	15 Desa	100%
	Fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa	Jumlah pembinaan administrasi pemerintahan desa		100%	15 Desa	15 desa	100%	15 Desa	15 Desa	100%
	Fasilitasi pengelola keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	Jumlah pembinaan pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa		100%	15 Desa	15 desa	100%	15 Desa	15 Desa	100%
	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah pembinaan sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dan		100%	15 Dea	15 desa	100%	15 Desa	15 Desa	100%

		Pembangunan Desa								
	Fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah pembinaan trantibum		100%	15 Desa	15 desa	100%	15 Desa	15 Desa	100%

	Fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa	Jumlah pembinaan penyusunan program PMD		100%	15 Desa	15 desa	100%	15 Desa	15 Desa	100%
	Koordinasi Pendampingan desa di wilayahnya	Jumlah Pendampingan Desa di Wilayahnya		100%	15 Desa	15 desa	100%	15 Desa	15 Desa	100%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam pelaksanaan pelayanannya, Perangkat Daerah mampu 2 Indikator, yaitu Nilai IKM, Nilai SAKIP. Dari 2 indikator tersebut berstatus 1 tercapai dan 1 indikator tidak tercapai. Faktor-faktor yang mempengaruhi ketercapaian tersebut antara lain adalah:

1. Merencanakan target kinerja
2. Menyelaraskan hal-hal yang akan dikerjakan dengan target kinerja
3. Menyelaraskan apa yang diinginkan sesuai dengan rencana kerja
4. Mengerjakan kegiatan sesuai dengan rencana kerja
5. Melaporkan capaian kinerja selaras dengan apa yang telah dilaksanakan dan direncanakan sebelumnya

Kegagalan capaian 1 indeks kinerja yaitu penilaian SAKIP tersebut disebabkan antara lain :

- a. Kurangnya data yang valid dan akuntabel.
- b. Belum terpenuhinya materi dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai ketentuan;
- c. Sosialisasi dan pendampingan dalam penilaian SAKIP yang masih kurang dari instansi pengampu.
- d. Kapasitas SDM dan pemahaman yang masih terbatas dalam penyusunan dokumen perangkat daerah.

Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam mencapai sasaran 2 (dua) pada indikator nilai Indeks penilaian SAKIP :

- a. Dokumen Renstra 2023-2026 tujuan yang disertai target keberhasilan, kinerja sasaran belum tersajikan;
- b. Output dan *outcome* yang dilaporkan belum menyajikan capaian target secara penuh dengan perbandingan tahun sebelumnya dan informasi yang disajikan belum dapat diandalkan .
- c. Belum melakukan revaluasi Renstra

Adapun alternatif solusi yang telah dilakukan untuk mencapai target tahun selanjutnya antara lain adalah : yang telah dilakukan untuk pencapaian target selanjutnya adalah dengan lebih teliti lagi dalam menyandingkan data.

Kinerja pelayanan Perangkat Daerah disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK LPPD	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2021	2022	2023	2024	2022	2023	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Nilai SAKIP	-	-	B	B	B	B	C	B	B	B	
	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	-	-	84	84	86	86	84,3	86,13	87	87	

2.1. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya melaksanakan pelayanan urusan Kewilayahan yaitu Berdasarkan arah kebijakan dan prioritas pembangunan berdasarkan hasil evaluasi, isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah untuk tahun 2024 mencakup urusan tersebut. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah diantaranya adalah:

1. Masih rendahnya kesadaran aparatur pemerintah Desa dalam melakukan implementasi program bidang kesra, PMD dan Pemerintahan.
2. Masih terbatasnya dukungan anggaran dan sarana prasarana untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi di wilayah Kecamatan.
3. Masih rendahnya kesadaran aparatur pemerintah Desa dalam mengerjakan buku-buku Administrasi Desa tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Masih rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam merencanakan pembangunan di desa masing-masing.

Permasalahan tersebut, jika tidak diselesaikan dapat menjadi *constraint* dalam pencapaian visi dan misi Bupati maupun capaian indikator lainnya. Beberapa dampak dari adanya permasalahan dan hambatan tersebut meliputi:

1. Kurangnya pemahaman perangkat pemerintah desa tentang administrasi kependudukan dan regulasi yang ada terkait pemerintahan desa.
2. Lemahnya pelayanan di pemerintah desa karena kurangnya pemahaman perangkat desa tentang penatausahaan keuangan desa dan aturan lainnya.
3. Kurang tercapainya suatu kegiatan sesuai indikator kinerja.

Tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan teknologi, peningkatan kualitas birokrasi, dan meningkatnya ekspektasi pemangku kepentingan pengguna layanan akan meningkatkan kebutuhan akan adanya penyediaan produk layanan yang semakin baik. Oleh karena itu, diperlukan inovasi-inovasi dalam menunjang peningkatan pelayanan publik secara kontinyu. Beberapa tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah, yaitu:

1. Tuntutan masyarakat dalam pelayanan yang cepat dan prima dan menuju profesionalisme kerja ASN / Perangkat desa.

2. Wacana kemandirian desa dan tuntutan adanya inovasi dan system aplikasi program dan kegiatan di desa.
3. Adanya tenaga pendampingan di desa – desa guna mencapai pembangunan desa yang lebih baik.
4. Peningkatan peran dan fasilitasi kecamatan dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah, pelayanan sarana dan prasarana umum serta pencapaian standar pelayanan minimal.

Berdasarkan permasalahan dan hambatan serta peluang dan tantangan tersebut, dapat diinventarisasi beberapa isu strategis. Inventarisasi isu-isu strategis tahun 2024 didapatkan dari hasil analisis kondisi internal dan eksternal Kabupaten Banjarnegara sampai dengan tahun 2023. Isu-isu strategis ini berkaitan dengan permasalahan-permasalahan pokok yang dihadapi, pemanfaatan potensi dan masalah keberlangsungan pembangunan. Isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah pada tahun 2024, sebagai berikut:

1. Penyesuaian anggaran di pemerintah daerah sebagai tidaklanjut kebijakan pusat.
2. Masih kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana baik secara kualitas maupun kuantitas, belum meratanya fasilitas laptop bagi pelaksana dan pejabat struktural, printer, LCD, lemari file, CCTV.
3. Kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya dokumen kependudukan dan pencatatan sipil serta rendahnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak bumi dan bangunan dengan tepat waktu serta tidak adanya penyelewengan dari petugas pungut pajak yang tidak langsung menyetorkan pembayaran pajak dari masyarakat ke bank.
4. Masih terbatasnya kualitas dan kuantitas pegawai yang ada di Kecamatan Susukan sehingga pengoptimalan tugas dan fungsi aparatur pemerintah kurang bisa tercapai sehingga menyebabkan kelambanan birokrasi.
5. Kurangnya pagu anggaran di tahun berjalan sehingga tidak semua program kegiatan bisa dilaksanakan secara 100% dan target yang ditentukan juga tidak tercapai 100%.

2.1. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

RKPD Tahun 2024 disusun dengan berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Tahun 2005-2025 dan mengacu pada RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 serta memperhatikan RPJMN 2020-2024. Berdasarkan hal tersebut, prioritas arah kebijakan sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah pada tahun 2024 meliputi:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
3. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
4. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

Pada Rancangan Awal RKPD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024, anggaran belanja yang dialokasikan untuk Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara diusulkan sebesar Rp. 1.743.882.136,- yang terbagi dalam 4 program 8 kegiatan dan 15 sub kegiatan. Hal ini sesuai dengan Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah, dan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang oleh Pemerintah Kabupaten Banjarnegara dilaksanakan mulai Tahun 2024. Secara rinci analisis kebutuhan anggaran belanja program kegiatan dan sub kegiatan terhadap Rancangan Awal RKPD tersaji pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3.
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2024 Kabupaten Banjarnegara

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Kecamatan Susukan				Rp 2.250.085.770,-					Rp 1.743.882.136,-	
A.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMEINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kec. Susukan	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terlaksana	100 %	Rp. 1.987.801.870	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMEINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kec. Susukan	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terlaksana	100%	Rp. 1.583.171.236	
1.	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Susukan	Persentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi kinerja Perangkat daerah	100 %	4.510.000	Perencanaan , Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Susukan	Persentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi kinerja Perangkat daerah	100%	4.510.000	

a.	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Kec. Susukan	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	7 Dokumen	3.250.000	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Kec. Susukan	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	7 Dokumen	3.250.000	
b.	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kec. Susukan	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	6 Laporan	1.260.000	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kec. Susukan	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	6 Laporan	1.260.000	
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec. Susukan	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	1.759.999.554	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec. Susukan	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	1.412.081.936	
a.	Penyedia gaji dan tunjangan ASN	Kec. Susukan	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	10 ASN	1.704.978.554	Penyedia gaji dan tunjangan ASN	Kec. Susukan	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	10 ASN	1.382.991.036	
b.	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Kec. Susukan	Jumlah pengelola keuangan yang terbayarkan	5 Orang	47.265.400	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Kec. Susukan	Jumlah pengelola keuangan yang terbayarkan	5 Orang	21.335.300	

c.	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran	Kec. Susukan	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	4 laporan	7.755.600	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran	Kec. Susukan	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	4 laporan	7.755.600	
3.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. Susukan	Persentase administrasi umum perangkat daerah	100%	95.958.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. Susukan	Persentase administrasi umum perangkat daerah	100%	95.958.000	
a.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Susukan	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	2 Paket	9.800.800	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Susukan	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	2 Paket	9.800.800	
b.	Penyedia bahan logistik kantor	Kec. Susukan	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	11 Paket	74.860.900	Penyedia bahan logistik kantor	Kec. Susukan	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	11 Paket	74.860.900	Perjalanan dinas berupa uang harian, transport, penginapan belum terpenuhi
4.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Susukan	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	44.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Susukan	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			

	Pengadaan Mebel	Kec. Susukan	Jumlah paket Mebel yang tersedia	1 paket	35.000.000	Pengadaan Mebel	Kec. Susukan	Jumlah paket Mebel yang tersedia	-	-	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Susukan	Jumlah paket peralatan dan mesin yang tersedia	1 set	9.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Susukan	Jumlah paket peralatan dan mesin yang tersedia	-	-	
5.	Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Susukan	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	61.492.416	Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Susukan	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	61.492.416	
a.	Penyedia jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kec. Susukan	Jumlah laporan penyedia jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik yang disediakan	12 Laporan	8.400.000	Penyedia jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kec. Susukan	Jumlah laporan penyedia jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik yang disediakan	12 Laporan	8.400.000	
b.	Penyedia jasa pelayanan umum kantor	Kec. Susukan	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 Laporan	55.000.000	Penyedia jasa pelayanan umum kantor	Kec. Susukan	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 Laporan	53.320.800	
6.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Susukan	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	21.841.900	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Susukan	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	20.196.800	
a.	Penyedia jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan	Kec. Susukan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	7 Unit	10.401.900	Penyedia jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan	Kec. Susukan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas	8 Unit	11.650.000	Pemeliharaan roda empat belum tercukupi anggarannya untuk

	dinas operasional atau lapangan		yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya			perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan		jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya			mencakup pemeliharaan selama satu tahun
b.	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Kec. Susukan	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi.	9 Unit	11.440.000	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Kec. Susukan	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi.	9 Unit	8.546.800	Pemeliharaan alat kantor, alat pendingin, dan gedung belum terpenuhi
B	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kec. Susukan	Persentase Terlaksananya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	144.000.500	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kec. Susukan	Persentase Terlaksananya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	97.210.900	
1.	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Kec. Susukan	Persentase Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	100%	18.984.200	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Kec. Susukan	Persentase Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	-	-	
a	Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/ atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Kec. Susukan	Jumlah dokumen Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/ atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan	1 dok	18.984.200	Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/ atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan	Kec. Susukan	Jumlah dokumen Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/ atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam	-	-	

			Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum			Prasarana Pelayanan Umum		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum			
1.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kec. Susukan	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100%	125.016.300	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kec. Susukan	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100%	97.210.900	
a	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kec. Susukan	Jumlah laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	1 Laporan	7.670.600	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kec. Susukan	Jumlah laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	-	-	
b.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan	Kec. Susukan	Jumlah laporan pelaksanaan non perizinan pada urusan Pemerintahan	1 Laporan	14.349.800	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan	Kec. Susukan	Jumlah laporan pelaksanaan non perizinan pada urusan Pemerintahan	1 Laporan	3.600.000	
c.	Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	Kec. Susukan	Jumlah laporan pelaksanaan kewenangan lain yang dilimpahkan	1 dok	102.995.900	Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	Kec. Susukan	Jumlah laporan pelaksanaan kewenangan lain yang dilimpahkan	1 Laporan	93.610.900	Anggaran untuk makan dan minum rapat belum tercukupi

C.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kec. Susukan	Persentase Terlaksananya Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	100%	1.500.000	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kec. Susukan	Persentase Terlaksananya Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	-	-	
1.	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kec. Susukan	Presentase telaksananya upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	100%	1.500.000	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kec. Susukan	Presentase telaksananya upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	-	-	
a	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kec. Susukan	Jumlah laporan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 lap	1.500.000						
D.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kec. Susukan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	18.500.000		Kec. Susukan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	13.500.000	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kec. Susukan	Terlaksananya Tugas Forum kordinasi Pimpinan di Kecamatan	100%	18.500.000		Kec. Susukan	Terlaksananya Tugas Forum kordinasi Pimpinan di Kecamatan	100%	13.500.000	

a.	Pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di Kecamatan	Kec. Susukan	Jumlah dokumen tugas forum koordinasi pimpinan di Kecamatan	4 Dokumen	18.500.000	Pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di Kecamatan	Kec. Susukan	Jumlah dokumen tugas forum koordinasi pimpinan di Kecamatan 4 Kali	4 Dokumen	13.500.000	Anggaran untuk makan dan minum rapat belum tercukupi
E.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kec. Susukan	Persentase fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100%	87.111.600	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kec. Susukan	Persentase fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100%	50.000.000	
1.	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Susukan	Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	87.111.600	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Susukan	Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	50.000.000	
	Fasiltsi penyusunan Perdes dan Peraturan Kepala Desa	Kec. Susukan	Jumlah dokumen Fasiltsi penyusunan Perdes dan Peraturan Kepala Desa	15 dok	3.402.000	Fasiltsi penyusunan Perdes dan Peraturan Kepala Desa	Kec. Susukan	Jumlah dokumen Fasiltsi penyusunan Perdes dan Peraturan Kepala Desa	-	-	
	Fasiltsi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec. Susukan	Jumlah dokumen Fasiltsi Administrasi Tata	15 dok	2.171.800	Fasiltsi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec. Susukan	Jumlah dokumen Fasiltsi Administrasi Tata	-	-	

			Pemerintahan Desa					Pemerintahan Desa			
a.	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilhan Kepala Desa	Kec. Susukan	Jumlah dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	2 Dokumen	50.000.000	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilhan Kepala Desa	Kec. Susukan	Jumlah dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	2 Dokumen	50.000.000	
	Fasilitasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset desa	Kec. Susukan	Jumlah dokumen Fasilitasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset desa	15 dok	2.263.800	Fasilitasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset desa	Kec. Susukan	Jumlah dokumen Fasilitasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset desa	-	-	
	Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan desa	Kec. Susukan	Jumlah dokumen Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan desa	15 dok	1.950.000	Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan desa	Kec. Susukan	Jumlah dokumen Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan desa	-	-	
	Fasilitasi Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Kec. Susukan	Jumlah dokumen Fasilitasi Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	15 dok	3.702.000	Fasilitasi Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Kec. Susukan	Jumlah dokumen Fasilitasi Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	-	-	

	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kec. Susukan	Jumlah dokumen Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	15 dok	14.520.000	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kec. Susukan	Jumlah dokumen Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	-	-	
	Koordinasi pendampinag Desa di wilayahnya	Kec. Susukan	Jumlah dokumen Koordinasi pendampinag Desa di wilayahnya	15 dok	9.102.000	Koordinasi pendampinag Desa di wilayahnya	Kec. Susukan	Jumlah dokumen Koordinasi pendampinag Desa di wilayahnya	-	-	

Berdasarkan RKPD Tahun 2024, terdapat beberapa hal yang menjadi catatan yaitu:

1. Tersedianya sumber Anggaran untuk membiayai Program dan Kegiatan.
2. Adanya Sumber daya Manusia yang Profesional

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berdasarkan musrenbang kecamatan dan forum konsultasi publik telah disampaikan usulan program dan kegiatan masyarakat melalui aplikasi SIPD. Usulan program/kegiatan/sub kegiatan tersebut diselaraskan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Usulan program dan kegiatan sebagai berikut:

Tabel .2.4
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 Kabupaten Banjarnegara

No	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	Rehabilitasi rumah tidak layak huni	Desa Dermasari	Rehabilitasi rumah tidak layak huni terlaksana	200.000.000	
2	Pembangunan /Rehabilitasi/Peningkatan fasilitas kesehatan/ pemenuhan kebutuhan air bersih	Desa Dermasari	Pembangunan /Rehabilitasi/Peningkatan/ fasilitas kesehatan/ pemenuhan kebutuhan air bersih terlaksana	200.000.000	
3	Pembangunan /Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	Desa Dermasari	Pembangunan /Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa terlaksana	150.000.000	
4	Pemeliharaan Jalan Desa	Desa Kemrangan	Pemeliharaan/rehabilitasi jalan desa yang terlaksana	300.000.000	

5	Pengadaan Listrik PJU	Desa Kedawung	Pengadaan Listrik PJU Terlaksana	300.000.000	
6	Pembangunan /Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa untuk meningkatkan ekonomi	Desa Berta+Karangjati	Pembangunan /Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa Terlaksana	950.000.000	
7	Perbaikan dan Pemeliharaan Saluran irigasi	Desa Piasa Wetan	Pemeliharaan/rehabilitasi saluran irigasi yang terlaksana	200.000.000	
8	Pembangunan /Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	Desa Gumelem Wetan	Pembangunan /Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa Terlaksana	300.000.000	
9	Rehabilitasi rumah tidak layak huni	Desa Gumelem Wetan	Rehabilitasi rumah tidak layak huni terlaksana	100.000.000	
10	Rehabilitasi rumah tidak layak huni	Desa Gumelem Kulon	Rehabilitasi rumah tidak layak huni terlaksana	600.000.000	
11	Pengadaan Listrik PJU	Desa Gumelem Kulon	Pengadaan Listrik PJU Terlaksana	520.000.000	
12	Pembangunan /Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	Desa Karangsalam	Pembangunan /Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa Terlaksana	700.000.000	
13	Pembangunan /Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	Desa Panerusan Wetan	Pembangunan /Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa Terlaksana	480.000.000	
14	Rehabilitasi rumah tidak layak huni	Desa Panerusan Kulon	Rehabilitasi rumah tidak layak	1.000.000.000	

			huni terlaksana		
15	Pembangunan /Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	Desa Panerusan Kulon	Pembangunan /Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa Terlaksana	700.000.000	
16	Pembangunan /Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	Desa Pakikiran	Pembangunan /Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa Terlaksana	200.000.000	
17	Pembangunan Bendung dan irigasi	Desa Susukan	Pembangunan Bendung dan irigasi terlaksana	1.300.000.000	
18	Rehabilitasi rumah tidak layak huni	Desa Derik	Rehabilitasi rumah tidak layak huni terlaksana	300.000.000	
19	Rehabilitasi rumah tidak layak huni	Desa Karangjati	Rehabilitasi rumah tidak layak huni terlaksana	200.000.000	
20	Pengadaan Listrik PJU	Desa Brengkok	Pengadaan Listrik PJU Terlaksana	600.000.000	

2 Penelaahan Usulan Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Berdasarkan hasil reses anggota DPRD, melalui aplikasi SIPD telah disampaikan usulan program dan kegiatan. Usulan program/kegiatan/sub kegiatan tersebut diselaraskan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Usulan program dan kegiatan sebagai berikut:

Tabel 2.6
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023 Kabupaten Banjarnegara

No	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Validasi
	NIHIL				

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2024 merupakan penjabaran Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024. Renja Perangkat Daerah selanjutnya menjadi platform operasional bagi Perangkat Daerah dalam menjalankan programnya dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam rangka sasaran pembangunan daerah tahun 2024 serta sebagai bagian dari dukungan terhadap pencapaian target RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 maupun RKP Tahun 2024.

1.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

1. Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing, dengan program prioritas sebagai berikut:
 - a. Perlindungan sosial dan penguatan tata kelola kependudukan;
 - b. Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial;
 - c. Peningkatan produktivitas dan daya saing.
2. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan, dengan program prioritas sebagai berikut:
 - a. Revolusi mental dan pembinaan ideologi pancasila;
 - b. Meningkatkan pemajuan dan pelestarian kebudayaan;
 - c. Memperkuat moderasi beragama;
 - d. Meningkatkan budaya literasi, inovasi dankreativitas.
3. Memperkuat stabilitas polhukanham dan transformasi pelayanan publik, dengan program prioritas sebagai berikut:
 - a. Konsolidasi demokrasi;
 - b. Penegakan hukum nasional;
 - c. Reformasi birokrasi dan tata kelola;dan
 - d. Menjaga stabilitas keamanan nasional

Rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan tahun 2024 dijabarkan ke dalam semua urusan yang menjadi kewenangan Kabupaten Banjarnegara, untuk kecamatan adalah :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari 5 Kegiatan dan 11 sub kegiatan.
- b. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik terdiri dari 1 kegiatan yang diarahkan pada kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat. Dengan 2 sub kegiatan yaitu Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan dan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Non Perizinan.

c. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum terdiri dari 1 kegiatan yang diarahkan pada kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah. Dengan 1 sub kegiatan yaitu Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan.

d. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa terdiri dari 1 kegiatan yang diarahkan pada kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, dengan 8 sub kegiatan yaitu :

1. Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Berdasarkan dokumen RPJMD Kabupaten Banjarnegara 2023-2026, Visi dan Misi Bupati Wakil Bupati Banjarnegara Tahun 2017-2022 sebagai berikut :

Visi yang akan dicapai adalah “**BANJARNEGARA BERMARTABAT DAN SEJAHTERA**”

Misi yang akan dilaksanakan merupakan turunan dari pokok-pokok visi yang telah diidentifikasi sebelumnya adalah :

1. Mewujudkan tata kehidupan masyarakat yang tertib, aman, damai dan demokratis;
2. **Mewujudkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan konsep tata kelola yang baik;**
3. Mewujudkan kemartabatan dan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar;
4. **Mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, produktif, transparan dan akuntabel dengan tenaga profesional;**
5. Mewujudkan kemartabatan dan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar.

Bertitik tolak dari kewenangan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Banjarnegara sebagaimana diuraikan pada bab terdahulu, dalam mencapai Visi Kabupaten Banjarnegara, maka Kecamatan Susukan mempunyai peran dan fungsi menggerakkan unsur organisasi untuk bertindak lebih terarah dalam menjembatani keadaan masa kini dan masa datang yang diinginkan. Terutama dikaitkan dengan pelaksanaan pelimpahan kewenangan yang secara mutlak harus didukung oleh sumberdaya manusia aparatur yang mampu mengelola tugas-tugas pelayanan secara optimal, efektif dan efisien, serta mampu

merumuskan kebijakan-kebijakan yang implementatif yang ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat, yang pada muaranya mewujudkan Visi Kabupaten Banjarnegara.

Adapun Misi yang menjadi bagian tak terpisahkan dalam pencapaian visi misi Kepala Daerah sesuai Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Susukan sebagai salah satu Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara dari lima misi tersebut adalah **Misi Kedua dan Keempat** yaitu :

1. Mewujudkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan konsep tata kelola yang baik;

Memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat, memperkuat komitmen untuk menciptakan *good and clean government*. Fokus peningkatan pelayanan publik dan peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintah daerah, Melalui fokus pertama, diharapkan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dapat lebih dekat dan transparan. Sedangkan melalui fokus kedua, diharapkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akan meningkat.

2. Mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, produktif, transparan dan akuntabel dengan tenaga profesional;

Tata kelola keuangan merupakan salah satu aspek dalam *good and clean government*, diharapkan melalui misi ini pengelolaan keuangan dapat dilaksanakan lebih efektif dan efisien, dan lebih mandiri dalam segi pembiayaan pembangunan.

Dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman tolok ukur kinerja dalam pelaksanaan pembangunan aparatur pemerintah yang diselaraskan dengan arah kebijakan dan program pembangunan daerah yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2023-2026 dan RENSTRA Kecamatan Susukan Tahun 2023-2026.

Kecamatan Susukan menetapkan Rencana Strategis Tahun 2023-2026 sebagai dasar acuan penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan, serta sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Susukan dalam tujuan organisasi pada tahun 2023-2026.

Reformasi pada sektor aparatur daerah pada hakekatnya merupakan tindakan atau kegiatan pembaharuan secara konseptual, sistematis, dan berkelanjutan. Untuk menyatukan persepsi dan fokus arah tindakan dimaksud, maka pelaksanaan tugas dan fungsi dilandasi **visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan dan program** yang ingin diwujudkan.

3.1 Program dan Kegiatan

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Banjarnegara
Tahun 2024**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.19.0000 Kecamatan Susukan

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.19.0000 Kecamatan Susukan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025								
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Pro gra m	Keluara n Sub Kegiata n	Hasil Kegiata n				Tolok Ukur	Target					
7					UNSUR KEWILAYAHAN													
7	1				KECAMATAN													
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				1.743.882.136									
7	1	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4.510.000									
7	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Yang disusun	Jumlah Dokumen Perencanaan dan evaluasi kinerja kinerja perangkat daerah yang tersusun	Kec. Susukan	100 %	8dokumen	1 Tahun	3.250.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Tersusunnya dokumen perencanaan	100%	3.250.000
7	1	1	2.01	6	Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	Jumlah Dokumen Perencanaan dan evaluasi kinerja kinerja perangkat daerah yang tersusun	Kec. Susukan	100 %	6 dokumen	1 tahun	1.260.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100%	1.260.000

7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah bahan logistik kantor yang terpenuhi	Jumlah bulan penyediaan administrasi umum perangkat daerah	Kec. Susukan		11 paket		74.860.900		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100%	88.714.100
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							61.720.800						
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air, listrik yang terpenuhi	Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan perangkat daerah	Kec. Susukan		12 lap		8.400.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100%	10.000.000
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah tenaga administrasi perkantoran	Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan perangkat daerah	Kec. Susukan		12 lap		53.320.800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			61.720.800
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							20.196.800						
7	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	Jumlah bulan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Susukan		7 unit		11.650.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100%	11.000.000

7	1	1	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	Jumlah bulan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pem. Daerah	Kec. Susukan		9 unit		8.546.800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100%	12.246.200				
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK													97.210.900									
7	1	2	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat																	
7	1	2	2.04	3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nont-perizinan	Cakupan Penyelenggaraan Pemrintahan dan Pelayanan Publik	Jumlah pengelola operator siak yang terbayarkan		Kec. Susukan		1 lap		3.600.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			14.349.800				
7	1	2	2.04	3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Cakupan Penyelenggaraan Pemrintahan dan Pelayanan Publik	Jumlah pengelola SPPT PBB yang tersalurkan		Kec. Susukan		1 dok		93.610.900		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100%	91.660.900				
7	1	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM													18.500.000				
7	1	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah													18.500.000				
7	1	05	2.01	8	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah pelaksanaan tugas forkompinca	Jumlah bulan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kec. Susukan		1.dok		13.500.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			18.500.000				
7	1	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA																	
7	1	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa													50.000.000				

7	1	06	201		Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Prosentase pelaksanaan pemilihan kepala desa	Jumlah desa yang melaksanakan pemilihan kepala desa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa	Kec. Susukan		1 dok		50.000.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			50.000.000
												TOTAL	1.743.882.136					

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program pada perangkat daerah merupakan program prioritas dalam Renstra 2023-2026. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program sebagaimana tercantum dalam RPJMD selanjutnya dijabarkan ke dalam program, kegiatan dan sub kegiatan. Pemilihan untuk masing-masing program/ kegiatan sebagai berikut :

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota terdiri dari 5 kegiatan yang diarahkan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah; Administrasi Keuangan Perangkat Daerah; Administrasi Umum Perangkat Daerah; h; Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan 11 sub kegiatan;

b. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik terdiri dari 1 kegiatan yang diarahkan pada kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat dan Koordinasi Pemeliharaan Prasana dan sarana Pelayanan Umum Dengan 1 sub kegiatan yaitu :

1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan;

c. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa terdiri dari 1 kegiatan yang diarahkan pada kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa. Dengan 1 sub kegiatan yaitu :

1. Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2024 merupakan penjabaran Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024. Renja Perangkat Daerah selanjutnya menjadi platform operasional bagi Perangkat Daerah dalam menjalankan programnya dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam rangka sasaran pembangunan daerah tahun 2024. Berkaitan dengan hal-hal tersebut, perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah setelah Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2024 dan APBD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 disepakati.
2. Kerangka pendanaan dalam Renja Perangkat Daerah masih bersifat sementara, sehingga masih dimungkinkan terjadi perubahan pagu yang disebabkan oleh pengurangan, penambahan, dan pergeseran anggaran antar program, antar kegiatan maupun antar sub kegiatan dalam kerangka penyusunan anggaran secara terpadu dan berbasis kinerja.
3. Renja Perangkat Daerah menjadi acuan bagi Kepala Perangkat Daerah dan segenap jajarannya serta pemangku kepentingan lainnya untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan, serta menjadi dasar dalam melaksanakan evaluasi pelaksanaan pembangunan

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal : 2 Januari 2024



NIP. 19840904 200312 1 001